

Nilai Subtansi Kekuasaan di dalam Ayat-ayat Madaniyyah Sebagai Basis Dasar Manifestasi Pemerintahan Ideal dalam Islam

Amdahurifky B, Erwan

STAI YDI Lubuk Sikaping, Indonesia, STAI Solok Nan Indah, Indonesia

Email : *amdahurifky@stai-ydi.ac.id, erwanstaisni81@gmail.com*

ABSTRAK

Kekuasaan dan Pemerintahan dalam Islam merupakan salah satu topik yang menarik dan memiliki diskursus yang unik. Sampai saat ini topik tersebut masih mengalami pro dan kontra dari berbagai aspeknya baik dari interpretasi ayat maupun implementasi terkait konsepnya. Negara-negara Islam dan mayoritas berpenduduk muslim sangat terpengaruh terhadap gagasan dan dinamika yang terjadi pada topik ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kritis dan sistematis argumen-argumen yang kokoh dan kuat serta kontekstual dalam meyakini sebuah pemahaman terutama tentang subtansi kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Madaniyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis maka didapati sebuah penjelasan bahwa petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Madaniyyah sangat merespon terkait substansi kekuasaan dan memperlihatkan basis dasar yang kokoh terhadap pemerintahan yang ideal dalam Islam. Pokok pentingnya adalah hakikat kekuasaan dan pemerintah milik tuhan. Allah SWT sebagai aktor penentu kebijakan terhadap pemberi kekuasaan di dunia. Nabi Muhammad SAW sebagai fasilitator untuk mengarahkan kepada indikator-indikator untuk mewujudkan kekuasaan dan pemerintahan yang ideal di dalam Islam itu. Nabi Muhammad SAW juga hadir sebagai pemberi contohnya. Ia tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul akan tetapi ikut tampil berposisi sebagai pemimpin negara dan pemerintahan.

Kata Kunci : Ayat-ayat Madaniyyah, Substantif, Pemerintahan dan Islam

A. Pendahuluan

Periode Madinah menjadi tumpuan penting sebagai dasar teoritis terkait pemerintahan Islam. Tidak sedikit kajian dan penelitian yang membahas tentang korelasi itu. Salah satu indikator penting dari argumentasinya adalah tentang terjadinya piagam madinah (Pulungan, 2014). Hal inilah yang menjadi salah satu poin penting dari kekuatan hubungannya itu walaupun ada juga yang mempertanyakannya dan bahkan tidak setuju dengan itu. Akhirnya kelompok ini menolak terhadap konsep pemerintahan atau negara Islam itu sendiri. Salah satu yang

menjadi tokoh utamanya adalah Ali Abdul Raziq. Ia disebut sebagai tokoh liberalisme dan ada juga yang mengatakan sebagai tokoh sekularisme murni. Pendapat Raziq itu dinilai kontroversial karena berbeda dengan kebanyakan ulama kala itu dan bahkan dianggap tidak mewakili Islam karena pemikirannya itu (Abd Rahman, 2021). Implikasinya juga bahwa pandangannya itu terlihat tidak mengakomodir akan fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan (Shobirin et al, 2023).

Pro dan kontra paradigma di atas terus berlanjut sampai sekarang dan bahkan sudah membuat pola tersendiri. Munculnya suatu asumsi-asumsi bahkan teori bahwa suatu kelompok atau individu akan terindikasikan berpaham fundamental apabila memilih untuk berpendapat bahwa Islam memiliki sistem pemerintah tersendiri. Kemudian kebalikan dari pada itu, akan tersematkan menjadi golongan yang liberal apabila berpandangan bahwa Islam tidak memiliki ajaran tentang sistem pemerintahan (Abd Rahman, 2021). Diskursus yang terjadi itu secara otomatis akan memberikan efek terhadap pemahaman dan interpretasi ayat-ayat Madaniyyah.

Apabila merujuk kepada kajian ilmu-ilmu alQuran maka pembahasan ayat-ayat Madaniyyah memiliki korelasi yang sangat kuat dengan periode dan fase Madinah karena ayat Madaniyyah artinya adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat hijrah ke kota Madinah (Rafiza et al, 2023). Inilah pandangan yang kuat dipilih oleh para ulama. Sehingga memberikan implikasi terhadap perbedaan dalam memahami tentang kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam yang dilandasi oleh ayat-ayat Madaniyyah itu. Ada beberapa ayat Madaniyyah yang menjadi landasan kuat terhadap argumentasi kehadiran khusus bagi sistem pemerintahan Islam itu walaupun pada sebaliknya bagi golongan yang tidak sepaham akan menolak ayat-ayat tersebut diinterpretasikan demikian.

Oleh sebab itu di dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa ayat Madaniyyah sebagai dasar penting untuk menunjukkan nilai-nilai substansi dari kekuasaan dan pemerintahan ideal dalam Islam. Penelitian ini tentu akan menambah argumentasi-argumentasi tambahan dari teori sebelumnya terkait isyarat-isyarat ayat dalam menopang pemahaman dan keyakinan terhadap eksistensi kehadiran sistem pemerintahan Islam itu.

B. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi ini menerapkan pengumpulan semua data yang terkait dengan topik pembahasan dari sumber kitab bacaan, baik dari kitab suci al-Qur'an sendiri maupun dari selainnya seperti kitab-kitab tafsir, buku-buku ilmiah yang terkait dengan kajian, artikel dan jurnal-jurnal serta teori-teori relevan yang terdapat dari referensi yang bisa diterima. Contohnya teori tersebut terdapat pada halaman-halaman yang ada pada internet.

Setelah itu, terkait data-data yang telah ditemukan itu selanjutnya akan penulis analisis secara mendalam dengan metode *content analytis* atau analisis isi dan dijelaskan secara gamblang dan terperinci. Konsep-konsep yang dihasilkan dari analisa dari teori-teori yang ada akan penulis gunakan sebagai dasar untuk membangun pemahaman yang lebih detail dan argumentatif yang berpatokan kepada perbandingan-perbandingan dari konsep-konsep yang didapati. Akhirnya dapat memberikan kerangka berfikir yang memiliki dasar kuat untuk dapat dijadikan pegangan bagi peneliti selanjutnya terhadap topik yang dibahas, agar dapat dikembangkan lebih baik lagi dan memberikan dampak yang positif.

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang sedikit

bersinggungan dengan judul penelitian yang penulis lakukan:

1. Muhammad Fatah Ilhami, Penafsiran Kiai Sya'roni Ahmadi Tentang Ayat-Ayat Kekuasaan (Studi Atas Pengajian Tafsir di Masjid Menara Kudus), Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin dan Humaniora, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. Yang menghasilkan bahwa kekuasaan menurut Kiai Sya'roni Ahmadi dibagi menjadi dua yakni, kekuasaan secara hakiki dan kekuasaan secara majazi. Kekuasaan secara hakiki menurut Kiai Sya'roni Ahmadi adalah Allah yang berkuasa dan memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki. Kekuasaan secara majazi menurut Kiai Sya'roi Ahmadi adalah kemampuan hebat yang dimiliki makhluk (manusia). Kekuasaan tersebut diperoleh dari berbagai sebab, baik usaha sendiri atau bantuan dari yang lain. Penjelasan tersebut dipengaruhi oleh konteks, audiens, dan eksistensi Kiai Sya'roni Ahmadi. (Ilhami, 2023).
2. Usman, (2018) Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam). Menghasilkan bahwa kekuasaan itu bersumber dari Tuhandan tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan mutlak, tetapi kekuasaan itu didelegasikan kepada manusia sebagai wakil (khalifah) di bumi yang mendapat perintah untuk menegakkan pemerintahan yang adil dan mewujudkan kesejahteraan bersama. (Usman, 2018).
3. Mubasirun, (2016). Kekuasaan dalam Tafsir Nusantara dan Relevansinya terhadap Persoalan Kebangsaan (Kajian terhadap Ayat-ayat Khalifah dalam Tafsir an-Nur, al-Azhar dan al-Mishbah). Menghasilkan bahwa dari kajian ini ditemukan sebuah kesimpulan bahwa khalifah yang memiliki makna kekuasaan hanyalah satu ayat yaitu dalam surat Shad [38]; 26. (Mubasirun, 2016).
4. Pulungan, (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an. Menghasilkan bahwa Meskipun al-Qur'an tidak menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya. Tapi, al-Qur'an menyebut adanya ide atau prinsip dasar pembentukan negara dan adanya kepala negara. Di sini, umat Islam diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan tuntutan kehidupan mereka yang sangat dipengaruhi perkembangan zaman. Demikian juga dalam kaitannya dengan term masyarakat madani juga tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Namun, ada dua kata kunci yang bisa mendekati konsep masyarakat madani, yakni term ummah dan term madinah. Kedua term ini, menjadi nilai dasar dan nilai-nilai instrumental bagi terbentuknya masyarakat madani, kata ummah, bisa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti ummah wasathan, khairu ummah dan ummah muqtashidah yang merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Saw segera setelah hijrah ke Madinah. Konsep dan kegiatan politik sistem pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan. (Pulungan, 2018).

Berdasarkan literatur review yang telah penulis paparkan di atas, maka jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, di mana penelitian ini secara rinci menjelaskan menjelaskan beberapa ayat Madaniyah

sebagai dasar penting untuk menunjukkan nilai-nilai substansi dari kekuasaan dan pemerintahan ideal dalam Islam. Penelitian ini tentu akan menambah argumentasi-argumentasi tambahan dari teori sebelumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Diskursus Seputar Pemerintahan dan Pengertiannya.

Pemerintahan atau pemerintah dalam bahasa Inggris di sebut '*government*' sedangkan dalam bahasa Prancis menggunakan istilah '*gouvernement*'. Kedua penyebutan yang hampir sama itu berasal dari bahasa latin yaitu '*gubernaculum*' yang biasa disebut oleh anak-anak bangsa Indonesia dengan gubernur. Sedangkan dalam bahasa Arab diungkapkan melalui kata '*hukumat*', di Amerika Serikat disebut dengan '*administration*' (Syafiie, 2019).

Terhusus di negara Belanda penyebutkan yang sejalan dengan maksud 'pemerintah' itu terbagi kepada dua istilah yaitu '*regering*' dan '*bestuur*' (Susanto, 2021). '*Regering*' sebutan yang digunakan untuk kekuasaan negara oleh yang berwenang dalam rangka menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka merealisasikan tujuan negara. Kemudian juga masuk dalam arti sebagai penguasa yang menetapkan perintah-perintah. Kata '*regering*' ini dipakai untuk menunjukkan pemerintahan pada tingkat nasional. Sedangkan kata '*bestuur*' lebih banyak mengungkap setiap badan-badan pemerintahan serta kegiatan secara langsung untuk usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat (Syafiie, 2019). Bahasa lainnya adalah diluar lingkungan '*Wetgeving*' (Legislatif) dan '*Rechtspraak*' (Yudikatif) (Susanto, 2021).

Penjelasan di atas adalah bagian arti pemerintahan secara singkat dan sederhana serta praktis. Lebih jauh dari pada itu, jika menyentuh ranah yang lebih dalam dan rinci terkait pemerintahan sebagai keilmuan maka beberapa pakar menunjukkan sikap pesimis serta meragukan "keilmuan" dari ilmu pemerintahan. Penyebabnya adalah selain karena terdesak oleh ilmu-ilmu lain yang memiliki titik fokus kajian yang sama atau malah tumpang tindih, pemikiran tersebut didasarkan pada "ketidakmandiriannya" ilmu pemerintahan untuk bekerja dalam memahami realitas sosial di masyarakat, sehingga tidak memiliki ciri khas sendiri. Artinya ilmu pemerintahan seringkali menggunakan konsep dan teori dari ilmu lain untuk bisa memiliki makna (Iyep & Neneng, 2017).

Kecemasan di atas, agaknya dapat terhindar sendirinya karena sebetulnya tidak ada yang salah dalam suatu ilmu apabila proses aktifitasnya meminjam konsep dan teori milik ilmu lainnya. Dalam perkembangan kekinian, banyak ilmu yang meminjam konsep dan teori dari ilmu lain termasuk ilmu yang dianggap sudah mapan sekalipun seperti sosiologi dan politik. Sebagai contoh untuk bisa menangkap realitas sosial terkait dengan interaksi sosial dalam masyarakat, strategi menyampaikan pesan atau gagasan pada masyarakat sosiologi meminjam konsep dan teori dari ilmu komunikasi, sehingga memunculkan sosiologi komunikasi (Iyep & Neneng, 2017). Bahkan Bayu Suryaningrat melihat bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari dari masa sebelum masehi oleh para filosof, yaitu Aristoteles dan Plato (Syafiie, 2019).

Untuk mendukung pernyataan di atas, alangkah baiknya dijelaskan pengertian pemerintahan menurut para pakar. Menurut W.S. Sayre pemerintah adalah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan sebagaimana ungkapannya "*Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its*

authority". Sedangkan menurut Robert Mac Iver menyatakan bahwa "*Government is the organization of men under authority...how man can be govern*". Pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai otoritas atau kekuasaan dan bertujuan juga bagaimana manusia itu diperintah(Syafiie, 2019). Dari sini terlihat bahwa pemerintahan itu harus dalam bentuk organisasi. Secara otomatis terjadi suatu perkumpulan manusia serta memiliki strukturnya. Kemudian terlihat juga harus memiliki otoritas yaitu kekuasaan dimana harus ada yang diperintah dan memiliki daerah atau tempat kedudukannya berada.

Penjelasan tentang arti pemerintah menurut Woodrow Wilson diakhir penjelasannya mengatakan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu terhubung dengan organisasi kekuatan angkatan militer dan senjata, akan tetapi termasuk juga dua atau sekelompok orang atau manusia dari sekian banyak yang disiapkan oleh suatu organisasi tertentu dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan tujuan-tujuan tertentu secara bersama, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Ini berarti sifatnya adalah terkait dengan urusan rakyat atau penduduk sipil. Lebih konkritnya dapat dilihat pernyataannya yaitu:

"Government in last analysis, is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few man, of many man, or for a community prepared by organization to realized its own purpose with referenceto the common affairsor the community(Syafiie, 2019).

Tidak hanya menjelaskan arti dan defenisi pemerintah secara praktis akan tetapi juga menyentuh ruang keilmuan, khususnya adalah tentang ilmu pemerintahan. Banyak pakar mendefinisikan terkait ilmu pemerintahan itu sendiri. Diantaranya oleh D.G.A Van Poelje yang mengatakan ilmu pemerintahan itu dengan "*De Bestuurkunde leert, hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt*" artinya adalah ilmu pemerintahan itu mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Robert Mac Iver mengatakan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah suatu ilmu bagaimana manusia-manusia itu dapat diperintah.

Talizihudu Ndraha mengatakan bahwa ilmu pemerintahan bagaimana dapat memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan *civil* dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Kemudian menurut Musanef bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu(Syafiie, 2019). Jadi dari berbagai defenisi di atas dapat penulis simpulkan terkait dengan ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mana membicarakan proses dinas-dinas itu difungsikan dengan baik. Saling berkoordinasi untuk melayani publik dengan maksimal sehingga tidak terjadi kesenjangan antara yang diperintah dan yang memerintah.

Periode Madinah sebagai Manifestasi Konsep Pemerintahan Islam secara Historis.

Salah satu ciri dan karakteristik ayat-ayat Madaniyyah adalah mdeskripsikan penjelasan tentang aspek-aspek sosial secara luas. Seperti hubungan sosial, hubungan internasional. Kemudian juga menggambarkan terkait kaidah-kaidah hukum dan masalah perundang-undangan(al-Qaththān, 2012). Ciri-ciri ini agaknya dapat mengakomodir ruang lingkup dari konsep pemerintahan secara modern. Artinya ayat-ayat madaniyyah secara

pancaran petunjuknya menjadi basis penting untuk melihat bagaimana dasar-dasar utama pemerintahan dalam Islam terutama jika dilihat dari proses terjadinya periode ayat-ayat madaniyyah.

Berdasarkan hal tersebut tidaklah keliru jika merespon pandangan M Bambang Pranowo tentang Negara Islam Madinah menjadi basis konsep pemerintahan secara historis yang dapat dilihat dan diterawang dari beberapa argumentasi. *Pertama*, Nabi Muhammad SAW mendapat bai'at dari beberapa kelompok masyarakat yang ada pada waktu itu. *Kedua*, sebagai kapasitas Beliau menjadi kepala Negara, Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada negara-negara besar untuk tunduk kepada nya, seperti surat Rasulullah SAW yang terkhusus ditujukan kepada Kaisar Heraklius. *Ketiga*, berhubungan dengan undang-undang yang Rasulullah SAW terapkan di Negara Madinah. Rasulullah SAW selalu mendasarkannya kepada wahyu dan hukum-hukum Allah SWT. Terkait firman Allah SWT dalam persoalan ini maka Nabi Muhammad SAW tidak minta pandangan kepada sahabat yang lainnya (Aziz, 2016).

Menanggapi konsep di atas, dapat dicerna bahwa paradigma historis mengungkapkan tentang kekuasaan politik dan pemerintahan Islam sudah mengalami masa puncaknya. Bukti-buktinya sudah terlihat dalam referensi-referensi klasik hingga modern serta ditambah lagi dengan argumentasi fisik peninggalan sejarah itu sendiri. Konsekwensinya adalah konsepnya tersebut menjadi acuan utama dalam pengembangan yang sesuai dengan berjalannya waktu dan berubahnya suasana (Buchori, 2009). Apalagi jika dilihat dari petunjuk al-Qur'an secara tersurat pada ayat

Salah satu faktor utama kekuatan politik Islam adalah konsepnya dibawa oleh manusia pilihan (*al-nās al-mushtafā*). Ia dibimbing oleh Allah SWT Sang Maha Pencipta, karena yang dibawanya adalah ajaran atau *risālah ilāhī*, oleh sebab itu Ia disebut sebagai Rasulullah SAW (utusan Tuhan/Allah SWT). Ia tidak hanya menjadi pemimpin agama melainkan juga kepala pemerintahan yang mengurus rakyatnya menuju kebaikan dan kemaslahatan yang hakiki. Dalam bahasa sejarah politik menurut Munīr Muḥammad al-Ghadhbān adalah misinya yaitu *dakwah siyāsī* (al-Ghadhbān, 2013). Priode madinah dalam dakwahnya merupakan masa pembentukan Negara dan sistem pemerintahan dalam naungan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.

Petunjuk Ayat-ayat Madinah tentang Nilai Subtansi Kekuasaan dan Pemerintahan Islam.

Philip K Hitti membahasakan tentang periode madinah adalah awal mula lahirnya negara Islam dengan bentuk yang lebih besar. Embrionya adalah dari komunitas agama. Masyarakat baru terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar yang berfondasikan kepada agama, bukan hanya dengan ikatan hubungan darah dan kekeluargaan semata. Semua yang hidup dalam komunitas itu, tanpa melihat afiliasi loyalitas lebih tua dan kesukuan, yang akhirnya menjadi saudara seiman secara ideal. Nabi Muhammad SAW menjadi wakil Tuhan dan penguasa tertinggi dunia, yang hakikatnya Allah SWT sebagai pemilik supremasi negara (K Hitti, 1970). Sebagaimana dalam firman Allah SWT;

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ

تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".(QS. Ali Imran/3:26)

M Quraish Shihab menyatakan dengan tafsiran ayat di atas bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai wakil Tuhan di Bumi yang mendakwahkan dan mengajarkan kepada umat manusia tentang Allah SWT sajalah Yang Maha pemilik hak mengatur dan berkuasa dalam segala hal. Hanya hak Allah SWT sajalah untuk memberikan kekuasaan atau kerajaan apapun kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah SWT berhak juga menghinakannya dan mengambilnya kembali dengan menggantinya dengan yang lain. Tugas Nabi Muhammad SAW hanya memberikan dan menunjukkan cara faktor-faktor segala penyebabnya(Shihab, 2020).

Ayat madaniyah di atas mendeskripsikan fungsi Allah SWT sebagai Maha Pemilik Kekuasaan, yang merupakan manifestasi dari Sifat dan Nama-nama Allah SWT yaitu *al-Mulk*, sinyal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagaimana berikut;

تَبْرَكَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Mahasuci Allah SWT yang menguasai (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu".(QS. al-Mulk/67:1)

Ayat ini merupakan Makkiyyah, akan tetapi memiliki keterkaitan kuat dengan hasilnya yang luar biasa pada waktu di Madinah. Ini merupakan deskripsi suatu proses pembentukan yang kokoh dalam konsep Negara Madinah. Argumentasinya adalah pada periode Makkah sudah sejak awal digambarkan secara gradual tentang suatu konsep kepemilikan kekuasaan yang ideal, kemudian ikut disertai dengan perubahan *mindset* pada masa sebelumnya, yang pada akhirnya, pembuktiannya dapat hadir dirasakan sewaktu pada periode Madinah.

Paradigma suatu relasi dengan argumentasi di atas, rasanya menjadi kuat sewaktu Robert N Bellah berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengawali dakwahnya dalam struktur pemerintahan yang matang dan belum terorganisir dengan baik, melainkan pada masyarakat kesukuan yang belum mencapai struktur politik yang disebut Negara. Kemudian dalam kenyataan yang Ia hadapi hampir setiap hubungan penting dinyatakan dalam kerangka ikatan keluarga, Nabi Muhammad SAW harus mengedepankan suatu konsep praktis organisasi politik yang dapat mengatasi dan mengikis ikatan-ikatan kekeluargaan(Buchori, 2009).

Selain itu dalam sebuah proses menuju kerangka Negara Madinah yang ideal, Nabi Muhammad SAW dengan para pengikutnya tidak dengan mudah mewujudkannya. Ada bimbingan yang secara terus menerus dari Sang Maha Pemilik alam semesta. Kemudian diikuti dengan ketabahan dan kesabaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

kompleksitas persoalan tidak membuat beliau surut dan berputus asa, akan tetapi dengan teguh pendirian dan penuh kasih sayang Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya dapat melaluinya dan mewujudkannya dengan baik. Karen Armstrong mengatakan Muhammad adalah seorang yang kompleks, memiliki sifat kasih sayang yang tinggi dan terkadang dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal yang sederhana atau pemikiran orang awam, akan tetapi mempunyai struktur tatanan yang jenius, dengan membawa agama Islam dengan damai dan bersifat rekonsiliasi (Buchori, 2009).

Akhirnya, periode madinah menjadi bukti sebagai konsep basis politik ideal agama Islam waktu itu, yang mana ayat Madaniyyah memberikan statmen penutup bahwa pada hakikatnya negara Madinah yang terbentuk merupakan manifestasi kekuasaan Allah SWT di atas bumi ini. Dalam bahasanya Abu 'Ala al-Maududi adalah pemerintahan ideal itu yakni kekuasaan dan kedaulatan tertinggi milik Tuhan. Oleh sebab itu manusia harus menegakkan wewenang Tuhan terhadap manusia itu sendiri (al-Maududi, 2010). Argumentasi ini disinyalir dari ayat Madaniyyah pada surat al-Hasyr [59] ayat 23-24 yang menjadi penguat dari ayat Madaniyyah sebelumnya:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24)

Artinya: "Dialah Allah tidak ada tuhan selain Dia. Maharaja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan (23) Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana (24). (QS. al-Hasyr/59:23-24)

Secara aplikasinya menurut Abu 'Ala al-Maududi adalah bahwa kedaulatan Tuhan itu dipraktekkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik seluruh yang terkait mengenai hukum Tuhan (al-Maududi, 2010). Jadi konsep Pemerintahan Madinah merupakan suatu bentuk Negara yang sudah dilalui fase-fasenya sejak periode Makkah.

Rasulullah SAW tidak hanya memiliki sifat penyampai risalah dakwah buat manusia semata, akan tetapi juga memiliki sifat kepala Negara (Harun, 1985). Hal ini semakna dengan pemaknaan kepemimpinan menurut al-Māwardī (w.450 H) (al-Māwardī, 2014) yang merupakan sebuah kesimpulan besar bagi fase Madaniyyah. Oleh sebab itu tidak salah dan memiliki keterkaitan yang kuat apabila ayat-ayat Madaniyyah menjadi cakupan komponen mendasar tentang konsep pemerintahan yang utama dan ideal.

Lebih lanjut tidak salah apabila ayat-ayat Madaniyyah menjadi basis utama dalam pembicaraan mengenai Negara dan sistem pemerintahan yang ideal, karena ayat-ayat Madaniyyah adalah ayat yang kebanyakan membahas mengenai politik Islam yang ideal (Dimiyāthī, 2017). Karena Islam di Madinah pada hakikatnya diturunkan untuk masyarakat yang paripurna, dipenuhi oleh warisan peradaban yang mengagumkan. Aqidah yang kuat lagi menghujam di dada. Sistem perekonomian yang teratur serta dilindungi oleh sistem politik yang mengakomodir segala aspek kehidupan masyarakat (Sāhir, 2015).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat Madaniyyah hadir sebagai kekuatan argumentasi secara spritual terhadap nilai-nilai substantif kekuasaan serta dapat memperlihatkan dan mendiskripsikan suatu basis penting dari manifestasi pemerintahan yang ideal dalam Islam. Kemudian aspek-aspek kontekstual dari ayat-ayat tersebut sangat memiliki pengaruh besar untuk menguatkan argumetasi ini dan memperjelas tentang hakikat kekuasaan dan pemerintahan ideal Islam tidak lepas dari kekuasaan Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan fasilitator secara real dan mendiskripsikan terkait indikator-indikator yang dapat menjadi acuan dalam menerapkannya.

Kekuasaan dan Pemerintahan Islam ini sangat berbasis kepada ketauhidan dan hadir dengan mengikuti indikator-indikator tersebut dan tentu tidak bisa lepas dari bimbingan dan pendampingan dari Allah SWT serta mengedepankan aspek-aspek kebaikan bersama. Hal ini sejalan dengan yang pernah diperlihatkan dan dipraktekam oleh Nabi Muhammad SAW serta bersama para khalifah penerusnya. Untuk mengakomodir perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini maka pemahamannya tentang kekuasaan dan pemerintahan Islam harus disejalkan dengan syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam ayat-ayat Madaniyyah serta hadis Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. (2016). *Chieftdom Madinah Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Buchori, Didin Saefuddin. (2009). *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Dimiyāthī, Muḥammad ‘Afif al-Dīn. (2017). *Mawārid al-Bayān fī ‘Ulūm al-Qur’an*. Malang: Lisan Arabi.
- Ghadhbān, Munīr Muḥammad al. (2013). *Al-Manhaj al-Siyāsī Li al-Sīrah al-Nabawīyah*. al-Qāhirah: Dār al-Salām.
- Hitti, Philip K. (1970). *History of The Arabs From The Earliest Times To The Present*. London: Mac Millan, edisi. 10.
- Ilhami, Muhammad Fatah Ilhami. (2023). "Penafsiran Kiai Sya’roni Ahmadi Tentang Ayat-Ayat Kekuasaan Studi Atas Pengajian Tafsir Di Masjid Menara Kudus." PhD diss., UIN RADEN MAS SAID.
- Maududi, Abu ‘Ala al. (2010). *Dasar-dasar Islam*. diterjemahkan oleh Achsin Mohammad dari judul *Fundamentals of Islam*, Bandung: Pustaka, cet. 10.
- Māwardī, Abī al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Habīb al. (2014). *al-Aḥkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilayāt al-Dīniyyah*. al-Qāhirah: al-Quds.
- Mubasirun, N. (2016). Kekuasaan dalam Tafsir Nusantara dan Relevansinya terhadap Persoalan Kebangsaan (Kajian terhadap Ayat-ayat Khalifah dalam Tafsir an-Nūr, al-Azhār dan al-mishbāh). *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(2), 153-168.
- Nasution, Harun. (1985). *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*. Jakarta: UI Press, jilid. 2.
- Pulungan, Suyuthi, (2014). *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an*. Yogyakarta: Ombak.
- Qaththān, Mannā’ al. (2012). *Pengantar Studi Ilmu al-Qur’an*. diterjemahkan oleh Aunur Rafiq El-Mazni, dari judul *Mabāhith Fī ‘Ulūm al-Qur’an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 7.
- Rāfi’, Sāhir. (2015). *Falsafah Maḥmūd al-Sulthah fī al-Islām*. al-Qāhirah: Rawāfid.
- Rafiza, Siti Nur dkk. (2023). Memahami Karakteristik Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyyah Dalam Perspektif Ahli Tafsir (Al-Zarkasyi, Jalaluddin Al-Suyuthi dan Manna; al-Qaththan). *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 11(2), 84.
- Rahman, Abd. (2021). Sistem Negara dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 22.
- Saefulrahman, Iyep dan Neneng Yani Yuningsih. (2017). *Pemerintahan: Ilmu dan Seni Mengelola Kekuasaan*. Bandung: Unpad Press.
- Shobirin, Ahmad Rofiq, Ali Imron. (2023). Interpretasi Fiqh Siyasah Pemerintahan Islam Pada Masa Khulafa’ al-Rasyidin. *Jurnal Penelitian*, 2023, 17(2), 296.
- Susanto, Sri Nurhari. Komponen. (2021). Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara, *Administrative Law dan Governance Journal*. 4(1), 145.
- Syafiie, Inu Kencana. (2019). *Ilmu Pemerintahan dan al-Qur’an*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Tafsir surat ali imron ayat 26 2020. (<https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-26#tafsir-quraish-shihabihat>, diakses 22 Januari 2020).
- Usman, U. (2018). Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas

Amdahurifky B, Erwan

Pemikiran Politik Islam). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 345-357. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4887>

Pulungan, J. S. (2018). Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an. *Intizar*, 24(1), 185-202.